

Ali Usman, Ketua PATAKA

Menangkis Ancaman Krisis Pangan Global: Strategi dan Implementasi Kebijakan dalam Memperkuat dan Memperluas Cadangan Pangan Pemerintah

DASAR PEMIKIRAN

Pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina hingga perubahan cuaca ekstrem telah mengganggu rantai pasok pangan, energi dan pupuk dunia. Ketidakpastian global ini berimplikasi kenaikan harga komoditas pangan dunia. Sedangkan beberapa komoditas pangan dan bahan baku masih impor. Jika tidak diantisipasi dan melakukan konsolidasi antar K/L dan swasta atau asosiasi. Maka persoalan kenaikan harga pangan berpotensi terjerebab ke jurang inflasi dan resesi ekonomi.

KAJIAN EMPIRIS

Pemangku kebijakan Kementan, NFA serta stakeholder perlu melakukan koordinasi, konsolidasi dan aksi kolaborasi semua pihak. Dalam menyediakan stabilitas pasokan dan harga sembako yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, bawang merah dan cabai. Pentingnya harmonisasi regulasi, sinkronisasi neraca komoditi dan merancang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga dapat memperkuat sistem ketahanan pangan nasional yang tangguh.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Membangun tata Kelola pangan nasional perlu kolaborasi berbagai pihak. Perlu kolaborasi antar K/L terkait, koperasi, pelaku usaha, Asosiasi dan BUMN Pangan. Kemudian koordinasi dengan Kementerian dan Dinas-dinas daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di daerah.
2. Lima neraca komoditas pangan nasional masih impor yang perlu diwaspadai yakni gandum, kedelai, bawang putih, daging lembu, dan gula konsumsi. NFA memperkuat CPP dan memperbaiki sistem logistik pangan agar distribusi

dan retribusi ditekan. Sehingga pasokan dan harga pangan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kementan perlu peningkatan produksi bahan pokok Pajale. Diversifikasi pangan lokal untuk CPP, serta memperbaiki sistem logistik hulu. Pengembangan modernisasi pertanian hingga melakukan gerakan ekspor.
4. Kementan mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri guna menurunkan rasio impor kedelai dan bungkil kedelai mencapai 74 juta ton. Pada 2026 target menanam kedelai sebanyak 900 ribu hektar. Melalui strategi intensifikasi lahan eksisting hingga 3x lipat. Kemudian ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) 250 ribu ha, program *Food Estate* dan *Integrated Farming*.
5. Memperkuat CPP, pemerintah pusat segera relokasi anggaran kepada NFA, karena punya andil besar peningkatan kesejahteraan petani. Melalui penyerapan hasil panen dengan harga yang pantas. Lalu menjual kembali dibawah harga pasar. Sehingga ada biaya yang harus ditanggung NFA.
6. Pasar ritel modern selalu didorong untuk menjadi pengendali harga. Kebijakan satu harga oleh ritel modern menggunakan sistem korporasi dan jaringan. Sebenarnya ritel sebagai menjaga inflasi agar harga-harga stabil. Sehingga di pasar becek dapat mengikuti kestabilan harga.
7. Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Pelaksanaannya belum optimal mulai *supply chain* yang terintegrasi semua pihak termasuk K/L dan BPS.
8. Pemerintah perlu mengintegrasikan ekosistem rantai pasokan. Jika tidak dapat menanam komoditas di negara sendiri. Maka dapat membeli lahan di luar negara yang bisa menghasilkan produk yang bisa dikirim kembali ke Indonesia.
9. Penyederhanaan dan sinkronisasi alur distribusi hilir dan logistik wilayah. Pemanfaatan pusat distribusi, serta pemberdayaan ritel modern dan pasar basah. Gudang menjadi hal yang penting ketika terjadinya krisis.
10. Transformasi digital menjadi keharusan, jika tidak maka usaha akan punah. *Platform* umum semestinya dapat terintegrasi sehingga memiliki basis data guna memudahkan mengontrol.
11. Akselerasi produktivitas pangan 9 komoditi untuk CPP, perlu terintegrasi dengan program Daerah Rawan Pangan (DRP), Pembangunan Desa dan Pedesaan (PDP) dan Gudang-gudang daerah.